
Strategi Pengembangan CSR LPD dalam Upaya Penguatan Implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada LPD di Kecamatan Kintamani)

Anak Agung Sri Purnami, I Ketut Selamat dan Ketut Sudarmini
Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
*Sri.purnami@gmail.com

How to cite (in APA style):

Purnami, A, A, S., Selamat, I, K., Sudarmini, K. (2019). *Strategi Pengembangan CSR LPD dalam Upaya Penguatan Implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada LPD di Kecamatan Kintamani)*. 18(2), pp.75-81. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.2.1161.75-81>

Abstract

The LPD is one of the MFIs belonging to the Pakraman Village that provides financial services to the local community based on the philosophy of Tri Hita Karana. In its development, LPD assets continue to grow and become non-bank institutions whose assets are the largest in Bali Province. As a form of responsibility for the local social environment, the LPD's profits are also for social funds or Corporate Social Responsibility (CSR). Therefore this research describes the LPD CSR development strategy in an effort to strengthen the implementation of Tri Hita Karana and Community Welfare, with studies on LPD in Kintamani District. The purpose of this research is to find out: (1) the form of LPD CSR implementation; (2) internal and external factors of the LPD in the implementation of the LPD CSR for strengthening Tri Hita Karana; and (3) LPD CSR development strategy for strengthening Tri Hita Karana and community welfare in Kintamani Subdistrict. The population of this research is all LPDs in Kintamani Subdistrict, and samples were selected by purposive sampling technique, so that there were 143 respondents. Data were collected through questionnaires, and then analyzed by SWOT analysis. The results of the research and discussion showed that the profits obtained by LPDs were partly allocated for social funds or CSR. So far the utilization of LPD CSR funds in Kintamani District is still limited to ritual activities in the temple (Parahyangan element). Some internal factors which are the strength of LPD in Kintamani District are: (1) the amount of third party funds; (2) LPD credit distribution policy; and (3) the quality of LPD management human resources. While several internal factors identified as LPD weaknesses in Kintamani District are: (1) quality of LPD services; (2) LPD promotion support; (3) LPD human resource competencies; and (4) commitment and competence of LPD administrators. Some external factors that constitute opportunities for LPD in Kintamani District are: (1) culture / customs of the local community; (2) education level of the surrounding community; (3) community attitudes; and (4) support from Pakraman village. While some external factors identified as LPD threats are: (1) information technology development; and (2) the development of the number of financial institutions. The strategy that is currently suitable to be applied to LPDs in Kintamani District is a hold and maintain strategy. The implementation of this strategy is to penetrate the market and develop products.

Keywords: Empowerment Strategy; Corporate Social Responsibility (CSR); Tri Hita Karana Implementation; SWOT Analysis; Village Credit Institutions

Abstrak

LPD merupakan salah satu LKM milik Desa Pakraman yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat setempat dengan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Dalam perkembangannya, aset LPD terus tumbuh dan menjadi lembaga non bank yang asetnya terbesar di Provinsi Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sosial setempat, keuntungan LPD juga diporsikan untuk dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu penelitian ini memaparkan strategi pengembangan CSR LPD dalam upaya penguatan implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan studi pada LPD di Kecamatan Kintamani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bentuk implementasi CSR LPD; (2) faktor-faktor internal dan eksternal LPD dalam implementasi CSR LPD untuk penguatan Tri Hita Karana; serta (3) strategi pengembangan CSR LPD untuk penguatan Tri Hita Karana dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kintamani. Populasi penelitian ini adalah seluruh LPD di Kecamatan Kintamani, dan sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh responden sebanyak 143 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dan selanjutnya dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh LPD, sebagian dialokasikan untuk dana sosial atau CSR. Selama ini pemanfaatan dana CSR LPD di Kecamatan Kintamani masih terbatas untuk kegiatan ritual di pura (unsur Parahyangan). Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) jumlah dana pihak ketiga; (2) kebijakan penyaluran kredit LPD; dan (3) kualitas sumber daya manusia pengelola LPD. Sedangkan beberapa faktor internal yang teridentifikasi sebagai kelemahan LPD di Kecamatan Kintamani adalah: (1) kualitas pelayanan LPD; (2) dukungan promosi LPD; (3) kompetensi sumber daya

manusia LPD; dan (4) komitmen dan kompetensi pengurus LPD. Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) budaya/istiadat masyarakat setempat; (2) tingkat pendidikan masyarakat sekitar; (3) sikap masyarakat; dan (4) dukungan desa pakraman. Sedangkan beberapa faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai ancaman LPD yaitu: (1) perkembangan teknologi informasi; dan (2) perkembangan jumlah lembaga keuangan. Strategi yang saat ini sesuai diterapkan pada LPD di Kecamatan Kintamani adalah strategi hold and maintain. Penerapan strategi ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan; Corporate Social Responsibility (CSR); Implementasi Tri Hita Karana; Analisis SWOT; Lembaga Perkreditan Desa

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah, memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik resikonya, mencapai pola konsumsi yang konsisten serta mengembangkan basis ekonominya. Salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah merupakan jenis LKM milik desa adat/pekraman di Bali, yang keberadaannya pertama kali dilandasi oleh Perda Tingkat I Bali No 06 Tahun 1986. Pembangunan LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, Memberantas sistem ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di daerah pedesaan, Menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan dan Menciptakan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di Desa. Keberadaan LPD menjadi lebih diperhatikan sebagai LKM, terlihat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali kembali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 8 Tahun 2002 disertai Keputusan Gubernur yang mengatur pendirian, lapangan usaha, modal, organisasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan pengawasan, serta pembinaan LPD.

Sebagai lembaga keuangan milik desa adat di Bali, LPD menjalankan usahanya juga menekan pada ajaran filosofi Tri Hita Karana yang mengacu pada menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (parhyangan), hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya (pewongan) dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam di sekitarnya (palemahan) (Damayanthi, 2011). Berdasarkan filosofi THK yang secara sadar dan nyata telah diterapkan oleh masyarakat di Bali, maka LPD juga memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat tempat LPD berdiri.

Sebagai suatu lembaga keuangan, LPD tentunya memperoleh keuntungan yang selanjutnya akan digunakan kembali sebagai modal, dan bahkan disisihkan untuk dana sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002 tentang LPD yang mewajibkan LPD untuk membagi labanya 20% untuk pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial, maka penelitian ini memaparkan strategi pengembangan CSR LPD dalam upaya penguatan implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan studi pada LPD di Kecamatan Kintamani.

Pada penelitian sebelumnya, Bagiada dan Darmayasa (2015) menyatakan Dalam pengelolaan LPD, pengurus LPD telah menerapkan CSR secara terpadu yang berdasarkan filosofi THK. Dalam implementasi CSR terpadu pada LPD Desa Adat Legian, LPD mengembangkan program baru yang sejalan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Bagiada & Darmayasa, 2015). Penelitian (Purwati & Tenaya, 2018) yang mengambil sample di LPD Desa Adat Kuta menyatakan pelaksanaan CSR di LPD Desa adat Kuta berlandaskan filosofi "3P" (Planet, People, Profit) yang terkandung dalam dalam CSR memiliki kemiripan dengan filosofi Tri Hita Karana. LPD Desa Adat Kuta juga menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan (unsur Parhyangan yang terkandung dalam filosofi THK) dalam mengimplementasikan CSR terpadu. Setiap filosofi yang dimiliki masyarakat Hindu-Bali (termasuk THK) selalu meyakini bahwa Tuhan sebagai faktor penting dalam semua sendi kehidupan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan LPD, pengurus LPD telah menerapkan CSR secara terpadu yang berdasarkan filosofi THK. Implementasi CSR terpadu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep CSR yang seiring kemajuan jaman semakin membutuhkan nilai-nilai spiritual yang berkaitan dengan nilai Ketuhanan sebagai landasan kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini terbatas pada bentuk implementasi CSR, faktor-faktor internal LPD dalam implementasi CSR, faktor-faktor eksternal LPD dalam implementasi CSR LPD di Kecamatan Kintamani untuk penguatan Tri Hita Karana dan strategi pengembangan CSR LPD di Kecamatan Kintamani untuk penguatan Tri Hita Karana dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kintamani.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kelembagaan LPD

Pengertian LPD menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 adalah usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama desa*. LPD merupakan lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang telah berkembang dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya pada anggotanya.

Lapangan usaha LPD adalah menghimpun dana *krama desa* dalam bentuk tabungan dan deposito. Di samping itu, juga menyalurkan pinjaman kepada *krama desa*, menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, dan menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. Tujuan LPD adalah (1) mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan penyaluran modal yang efektif, (2) membrantas ijon, gadai gelap, dan sejenisnya, (3) menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, (4) meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka LPD seharusnya terus meningkatkan kinerjanya agar tetap menjadi utama desa yang terpercaya.

Tri Hita Karana

Tri Hita Karana (THK) adalah sebuah filosofi masyarakat Hindu Bali. Filosofi THK menekankan bahwa dalam proses kehidupan menuju hidup yang sejahtera, manusia ditekankan untuk menjaga keserasian atau keharmonisan antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa (*parhyangan*), manusia dengan alam/lingkungannya (*palemahan*), dan manusia dengan sesamanya (*pawongan*) sebagai suatu kesatuan yang utuh (Dwirandra, 2011).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) sering juga disebut pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan penjelasan yang menggambarkan tanggung jawab sosial perusahaan/lembaga terhadap masyarakat. CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Hackston & Milne, 1996).

Pendapat lainya oleh (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995) menjelaskan bahwa CSR memperluas tanggung jawab sosial, di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal. Secara lebih luas menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan hanya mencari laba.

Kesejahteraan Masyarakat

Hidup sejahtera merupakan keinginan setiap orang, suatu kondisi dimana orang dalam keadaan makmur, sehat, aman sentosa dan harmonis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keadaan sejahtera adalah terpenuhinya kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual seperti rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentrangan lahir bathin. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera tidak hanya tercukupi kebutuhan material tetapi juga harus didasarkan pada perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan spiritual, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dan antar masyarakat sekitar lingkungan.

III. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya

diperoleh dari sampel populasi dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Kintamani masih terdapat LPD yang tidak dalam kondisi baik. Selain itu masyarakat di Kecamatan Kintamani masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat, sehingga sangat penting pengembangan CSR LPD bagi kesejahteraan masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LPD pada Desa Pakraman di Kecamatan Kintamani yang berjumlah 63 unit. Selanjutnya sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yang berarti bahwa sampel ditentukan dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bias lebih representatif (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang dipakai sampel adalah LPD di Kecamatan Kintamani yang di kategorikan sehat yaitu sebanyak 37 unit LPD, Dengan responden sebanyak 143 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan teknik analisis data dilakukan dengan analisis SWOT.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi CSR LPD di Kecamatan Kintamani

LPD tentunya juga merupakan organisasi yang profit oriented namun tetap mengedepankan tujuan mewujudkan kesejahteraan warga desa pakraman. Pengelolaan dana sosial tersebut adalah bentuk CSR LPD. Selama ini CSR LPD di Kecamatan Kintamani diarahkan untuk meringankan beban krama terutama dalam kegiatan ritual keagamaan, sebagai salah satu bentuk implementasi konsep parahyangan. Dengan bantuan CSR LPD untuk kegiatan ritual upacara keagamaan diharapkan akan mengurangi beban masyarakat untuk kegiatan dimaksud, sehingga uang masyarakat dapat diarahkan untuk hal lain yang sifatnya lebih produktif. CSR LPD sesungguhnya juga dapat diarahkan secara langsung untuk kegiatan lain seperti implementasi pawongan dan palemahan. Contohnya adalah untuk beasiswa dan upaya pelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Kintamani yang kegiatan ekonomi masyarakatnya sebagian besar mengandalkan potensi alam.

Identifikasi Faktor-faktor Internal LPD Dalam Implementasi CSR LPD

Tabel 1

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) LPD di Kecamatan Kintamani
 Analisis lingkungan internal LPD di Kecamatan Kintamani dilakukan dengan mengalikan bobot

No	Indikator Variabel Internal	Bobot (%)	Rating	Nilai Tertimbang 5 = 3 x 4
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Jumlah kredit yang disalurkan LPD	0.06	2.27	0.14
2	Jumlah dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) pada LPD	0.07	2.57	0.18
3	Tingkat bunga kredit LPD	0.06	2.29	0.14
4	Kebijakan penyaluran kredit LPD	0.08	2.70	0.22
5	Kualitas pelayanan LPD	0.06	2.06	0.12
6	Dukungan promosi LPD	0.06	2.14	0.13
7	Kualitas sumber daya manusia pengelola LPD	0.07	2.61	0.18
8	Kompetensi sumber daya manusia LPD	0.06	2.10	0.13
9	Loyalitas sumber daya manusia pengelola LPD	0.06	2.25	0.14
10	Budaya organisasi LPD	0.07	2.56	0.18
11	Komitmen dan kompetensi pengurus LPD	0.06	2.15	0.13
12	Dukungan peralatan administrasi dan komunikasi LPD	0.07	2.48	0.17
13	Sistem pengendalian akuntansi LPD	0.07	2.58	0.18
14	Keuntungan LPD	0.07	2.31	0.16
15	Alokasi CSR LPD	0.08	2.69	0.21
	Jumlah	1.00	2.38	2.40

dengan rating nilai yang diperoleh berdasarkan kuesioner. Tabel 5.4 menunjukkan *internal factor analysis* (IFAS) LPD di Kecamatan Kintamani. Nilai rata-rata tertimbang dikategorikan sebagai kekuatan bila bernilai $2,50 < N \leq 4,00$ dan dikategorikan kelemahan bila bernilai $1,00 < N \leq 2,50$.

Berdasarkan nilai rata-rata tertimbang IFAS pada Tabel 5.4, disajikan bahwa faktor internal

strategis, LPD di Kecamatan Kintamani saat ini bernilai 2,40, yang berarti masih di bawah 2,5 dan merupakan kelemahan LPD. Seluruh faktor strategis internal memiliki nilai berkisar antara 0,12 sampai 0,22. Faktor kualitas pelayanan LPD memiliki nilai paling rendah (0,12). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa faktor tersebut dinilai paling rendah diantara faktor yang lain dalam optimalisasi CSR LPD. Kualitas pelayanan LPD perlu mendapat perhatian khusus serta ditingkatkan sehingga mampu mengoptimalkan kegiatan LPD.

Bila diklasifikasikan berdasarkan rentang nilai sebagaimana Tabel 4.3, maka faktor internal yang merupakan kekuatan LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) kebijakan penyaluran kredit LPD; (2) alokasi CSR LPD; (3) kualitas sumber daya manusia pengelola LPD; (4) sistem pengendalian akuntansi LPD; (5) jumlah dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) pada LPD; dan (6) budaya organisasi LPD.

Sedangkan faktor-faktor internal yang merupakan kelemahan LPD di Kecamatan Kintamani antara lain: (1) kompetensi sumber daya manusia LPD; (2) dukungan promosi LPD; (3) komitmen dan kompetensi pengurus LPD; (4) loyalitas sumber daya manusia pengelola LPD; (5) jumlah kredit yang disalurkan LPD; (6) tingkat bunga kredit LPD; (7) keuntungan LPD; dan (8) dukungan peralatan administrasi dan komunikasi LPD.

Identifikasi Faktor-faktor Eksternal LPD Dalam Implementasi CSR LPD

Analisis lingkungan eksternal LPD di Kecamatan Kintamani dilakukan dengan mengalikan bobot dengan rating nilai yang diperoleh berdasarkan kuesioner. Tabel 2 menunjukkan *external factor analysis* (EFAS) LPD di Kecamatan Kintamani. Nilai rata-rata tertimbang dikategorikan sebagai kekuatan bila bernilai $2,50 < N \leq 4,00$ dan dikategorikan kelemahan bila bernilai $1,00 < N \leq 2,50$.

Tabel 2
External Factor Analysis Summary (EFAS) LPD di Kecamatan Kintamani

No	Indikator Variabel Internal	Bobot	Rating	Nilai
		(%)		Tertimbang
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
1	Dukungan desa pakraman	0.09	2.80	0.25
2	Dukungan awig-awig	0.07	2.15	0.15
3	Intensitas kegiatan adat dan agama masyarakat sekitar	0.07	2.17	0.15
4	Kondisi keuangan masyarakat sekitar	0.07	2.09	0.15
5	Tingkat pendidikan masyarakat sekitar	0.09	2.85	0.26
6	Laju pertumbuhan ekonomi Bali	0.07	2.31	0.16
7	Dukungan permodalan dari Pemerintah	0.08	2.56	0.20
8	Inflasi	0.07	2.27	0.16
9	Sikap masyarakat	0.09	2.80	0.25
10	Budaya/istiadat masyarakat setempat	0.09	2.85	0.26
11	Perkembangan jumlah lembaga keuangan	0.07	2.04	0.14
12	Kebijakan pemerintah daerah	0.08	2.35	0.19
13	Perkembangan teknologi informasi	0.06	2.00	0.12
	Jumlah	1.00	2.40	2.44

Berdasarkan nilai rata-rata tertimbang EFAS pada Tabel 2, disajikan bahwa faktor eksternal strategis LPD di Kecamatan Kintamani saat ini bernilai 2,44, yang berarti masih di bawah 2,5 dan merupakan ancaman LPD. Seluruh faktor strategis eksternal memiliki nilai berkisar antara 0,12 sampai 0,26. Faktor perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang dinilai terendah (0,12). Hal ini menunjukkan bahwa faktor teknologi informasi belum optimal berkontribusi terhadap implementasi CSR LPD di Kecamatan Kintamani.

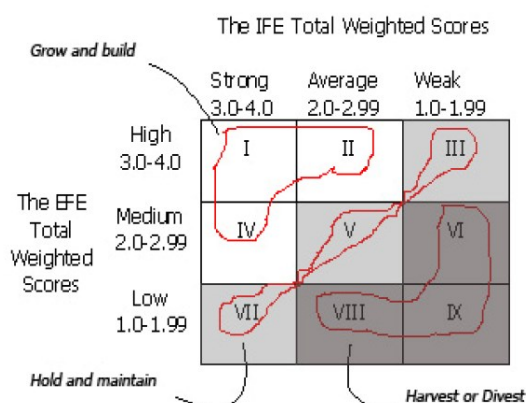
Bila diklasifikasikan berdasarkan rentang nilai sebagaimana Tabel 2, maka faktor eksternal yang merupakan peluang LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) tingkat pendidikan masyarakat

sekitar; (2) budaya/istiadat masyarakat setempat; (3) dukungan desa pakraman; (4) sikap masyarakat; dan (5) dukungan permodalan dari pemerintah.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang merupakan ancaman LPD di Kecamatan Kintamani antara lain: (1) perkembangan teknologi informasi; (2) perkembangan jumlah lembaga keuangan; (3) kondisi keuangan masyarakat sekitar; (4) dukungan awig-awig; (5) intensitas kegiatan adat dan agama masyarakat sekitar; (6) inflasi; (7) laju pertumbuhan ekonomi Bali; dan (8) kebijakan pemerintah daerah.

Strategi Pengembangan CSR LPD di Kecamatan Kintamani

Hasil analisis internal dan eksternal (IFAS dan EFAS) selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks internal-eksternal atau sering disebut matriks IE. Pada matriks IE terdapat sembilan sel (Gambar 5.1), dengan penerapan strategi sebagai berikut: (1) strategi growth and build diterapkan apabila posisi perusahaan/institusi berada pada sel I, II, dan IV; (2) strategi hold and maintain diterapkan apabila posisi perusahaan/institusi berada pada sel III, V, dan VII; dan (3) strategi harvest and diverst diterapkan bila perusahaan/institusi berada pada sel VI, VIII, dan IX.



Gambar 1
Matriks IFAS – EFAS (IE Matrix)

Berdasarkan analisis internal dan eksternal, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang IFAS LPD di Kecamatan Kintamani adalah 2,40 (average) dan nilai rata-rata tertimbang EFAS LPD di Kecamatan Kintamani adalah 2,44 (medium), sehingga posisinya dalam matriks IE berada pada sel V, yang berarti bahwa LPD di Kecamatan Kintamani saat ini mempunyai daya saing dan daya tarik kategori sedang.

Strategi yang saat ini sesuai diterapkan pada LPD di Kecamatan Kintamani adalah strategi hold and maintain. Penerapan strategi ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar maksudnya adalah dengan berupaya menambah jumlah nasabah LPD di Kecamatan Kintamani, yang dapat dilakukan dengan menawarkan produk yang lebih inovatif sehingga masyarakat tertarik dengan produk LPD.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah LPD di Kecamatan Kintamani dapat menyalurkan kredit dalam bentuk produk yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Sehingga kredit yang diberikan kepada masyarakat sifatnya lebih produktif. Terkait dengan CSR, apabila keuntungan yang diperoleh LPD mengalami peningkatan tentunya akan berdampak bagi peningkatan porsi CSR LPD bagi desa pakraman. Bentuk CSR selama ini terbatas untuk kegiatan ritual di pura (unsur Parahyangan), kedepannya diharapkan CSR juga dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan maupun memberikan bantuan bagi masyarakat miskin sebagai bentuk implementasi konsep pawongan dan palemahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Keuntungan yang diperoleh LPD, sebagian dialokasikan untuk dana sosial atau CSR. Selama ini pemanfaatan dana CSR LPD di Kecamatan Kintamani masih terbatas untuk kegiatan ritual di pura (unsur Parahyangan). Faktor internal yang merupakan kekuatan LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) jumlah

dana pihak ketiga; (2) kebijakan penyaluran kredit LPD; dan (3) kualitas sumber daya manusia pengelola LPD. Sedangkan beberapa faktor internal yang teridentifikasi sebagai kelemahan LPD di Kecamatan Kintamani adalah: (1) kualitas pelayanan LPD; (2) dukungan promosi LPD; (3) kompetensi sumber daya manusia LPD; dan (4) komitmen dan kompetensi pengurus LPD. Faktor eksternal yang merupakan peluang LPD di Kecamatan Kintamani yaitu: (1) budaya/istiadat masyarakat setempat; (2) tingkat pendidikan masyarakat sekitar; (3) sikap masyarakat; dan (4) dukungan desa pakraman. Sedangkan beberapa faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai ancaman LPD yaitu: (1) perkembangan teknologi informasi; dan (2) perkembangan jumlah lembaga keuangan. Strategi yang saat ini sesuai diterapkan pada LPD di Kecamatan Kintamani adalah strategi *hold and maintain*. Penerapan strategi ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). In *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-4* (pp. 798–815). Retrieved from <https://docplayer.info/39967955-Implementasi-filosofi-tri-hita-karana-dalam-pengungkapan-tanggung-jawab-sosial-pada-lembaga-perkreditan-desa-lpd-badung-bali-80364.html>
- Damayanthi, I. G. A. E. (2011). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–17. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEv_yCkJrjAhUOSX0KHTxhDrQQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fjiab%2Farticle%2Fdownload%2F2656%2F1870&usq=AOvVaw3Tjf7ommuwosaKy3tgp4R
- Dwirandra, A. A. N. B. (2011). *Rekonstruksi Metoda Penilaian Aset dengan Filosofi Tri Hita Karana*. Universitas Brawijaya.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002
- Purwati, D. K. I., & Tenaya, A. I. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Filosofi Tri Hita Karana Pada Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 2203–2229. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p22>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.